

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chawazi, *Hukum Pidana*. (2002). Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Asikin Zainal & Joni, A. (2020). *Tindak Pidana Korupsi: Politik Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin. (2011). *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Jaya.
- Barda Nawawi Arief, dan Muladi. (2005) *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung.
- Bambang Purnomo. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Cholid Narbuko dan Abu Achnadi. (2002). *Metode Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Elwi Danil. (2011). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. (2016). *Buku Panduan Akademik*, Lhokseumawe, Unimal Press.
- Friedman Lawrence M. (1975). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, New York: Russell Sage Foundation.
- Binsar Gultom. (2014). *Pandangan Kritis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Haryono. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia.
- Indriyanto Adji. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum.

- Leden Marpaung. (1991). *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram Press University, Mataram.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (1991). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi. (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- P.A.F. Lamintang. (1994). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Preneda Media Group.
- Radbruch Gustav. (2006). *Filsafat Hukum*. Terjemahan dari *Einführung in die Rechtswissenschaft*, diterbitkan dalam Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif Hukum untuk Manusia*. Jakarta. Kompas.
- R. Soeroso. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad. (2011). *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, UII Press.
- Soerjono Soekanto (b). (2006). *Pengantar Penelitian Hukum* Buku 2, UI-Press.
- Soerjono Soekanto (a). (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Buku 1 Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2013). *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yopie Morya Immanuel Patiro. (2012). *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, KeniMedia.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*’, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Nabila Ihja NM. (2023). *Rekonstruksi Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Uii Yogyakarta.

Tri Raharjanto. (2022) *Perampasan Harta Dari Hasil Korupsi*, Pasaman, Azka Pustaka.

Tri Andrisman, (2009). *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila.

Dr.Sumaryati Dkk, (2019). *Pendidikan Anti Korupsi Dalam Keluarga Sekolah Dan Masyarakat*, UAD Press, Yogyakarta.

Purwaning M. Yanuar, (2007), *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung.

B. Undang-undang

Undang-undang Dasar Tahun 1945, Amandemen Ke IV

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Hasil Rapat Musyawarah Kamar Mahkamah Agung tentang pedoman penjatuhan pidana pasal 2 dan 3 tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal

Deanti Nova Sari, *Pertanggungjawaban Rumah Sakit Daerah Terhadap Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Di Pemerintahan Kota Binjai (Analisis Putusan Nomor 56/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018.

Dyan Ayu Pitaloka *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan RSUD Peswaran (Studi Putusan*

Nomor10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk), Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Lampung, 2021.

Dwina Elfika Putri, *et. al.*, Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid. Sus/2019, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 6 Juni, 2023.

Hilal Arya Ramadhan, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH, Vol. IV No. 2, 2021. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/4267>.

Mohammad Al Faridzil Gunawan Nachrawi, *Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6, No. 2, 2022.

Putra Zenno Januarsyah (2019), I Gde Pantja Astawa, Romli Atmasasmita, dan Elisatris Gultom, “*Corrective Justice: An Economic Approach for Law*,” *Journal of Advanced Research in Law and Economics*.

Rapika Hasanah, *Penjatuhan Vonis Nihil Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 49/Pid.sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)*, Tesis, Fakultas Hukum Malikussaleh. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4984>.

Rizal, Raja Bakkara “*Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengurangan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.Tpk/2021/PT.Dki.)*” Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2023.

Ramadan Tabiu, Heryanti, and Sahrina Safiuddin (2021), “*Asas Keseimbangan Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Pancasila Menuju Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional*,” *Halu Oleo Law Review*.

Tamarsah, Faisal, Hamdani, *Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 10, No 2. 2022. DOI: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/10445>.

Umami Kalsum, Ferdy Saputra, *Analisis Yuridis pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm*,

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
<https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/10094>.

Siswantari Pratiwi, *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Binamulia Hukum Vol 11, No 1, Juli (2022), 71-73.

Djefriye Thon, *Kajian hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No 20 Tahun 2001, Lex Privatum*, Vol. IV/ No. 7 (2016).

Naomi Sari Kristiani Dkk, ‘*Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil*’(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus TPK 2018/PN. Mdn. Jurnal Hukum Vol. 2, No. 1, (2020).

Makalah “*Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Tuntutan*” dalam *Jurnal Swara Justitia*, Universitas Negeri Padang, (2024).

Muhammad Agung Riyadi, ‘*Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pidana Lebih Rendah Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus Korupsi Di Indonesia*’, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, (2025).